



Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pembangunan Keluarga

Helmy Fuadi*, Baiq Ismiwati, Baiq Saripta

Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Indonesia 83115

Email Korespondensi: helmyfuadi@yahoo.co.id

Abstrak

Dinamika demografis Nusa Tenggara Barat yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang menonjol, keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama. Pendekatan interdisipliner digunakan untuk memeriksa faktor-faktor yang memicu pertumbuhan penduduk serta implikasi sosial, budaya, dan ekonominya pada dinamika keluarga. Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2020, Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi diluar pulau Jawa yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup signifikan. Proyeksi penduduk menggunakan SUPAS 2015, diperkirakan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sampai dengan 2035 menurun dibawah 1.17, namun dari hasil Sensus Penduduk 2020 ternyata LPP meningkat menjadi 1.63. Terkait dengan hal ini, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas penduduk tentu berubah dan perlu dilakukan penyesuaian. Pertambahan penduduk Nusa Tenggara Barat yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan yang semakin kompleks. Hal ini terlihat pada pencapaian indikator pembangunan keluarga yang diukur menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Walaupun dari tahun ke tahun pencapaian nilai IPM Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan, tetapi peningkatan tersebut terlihat sangat lambat. Peningkatan LPP tersebut harus diiringi dengan penyesuaian SPM untuk menjaga kualitas penduduk yang terkait dengan Pembangunan Keluarga.

Kata kunci: Pertumbuhan Penduduk, Pembangunan Keluarga.

The Increase in Population Growth Rate in Relation to Family Development

Abstract

The demographic dynamics of West Nusa Tenggara, characterized by a prominent population growth rate, have made family sustainability and welfare the primary focus. An interdisciplinary approach is employed to examine the factors driving population growth and the social, cultural, and economic implications on family dynamics. According to the 2020 Population Census data, West Nusa Tenggara is one of the provinces outside Java experiencing significant population growth. Population projections using the 2015 Population Survey (SUPAS) estimated that the Population Growth Rate (PGR) would decrease below 1.17 by 2035. However, the 2020 Population Census results revealed an increase in PGR to 1.63. In response to this, policies established to improve population quality need to be adjusted due to the change in PGR. The continuous population growth in West Nusa Tenggara from year to year will give rise to increasingly complex issues. This is evident in the achievement of family development indicators measured using the Minimum Service Standards (SPM). Despite the incremental improvement in the Human Development Index (HDI) values for West Nusa Tenggara each year, the progress appears to be slow. The rise in PGR must be accompanied by adjustments to the SPM to maintain the quality of the population related to family development.

Keywords: Population Growth and Family Development.

How to Cite: Fuadi, H., Ismiwati, B., & Saripta, B. (2023). Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pembangunan Keluarga. *Empiricism Journal*, 4(2), 673–678. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1706>



<https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1706>

Copyright© 2023, Fuadi et al

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan keluarga di banyak wilayah, termasuk Nusa Tenggara Barat. Dinamika populasi yang cepat di daerah ini telah menimbulkan sejumlah perubahan dalam struktur keluarga serta mempengaruhi progres pembangunan sosial-ekonomi (Kusumastuti & Mahadeva, 2018). Fenomena pertumbuhan populasi yang cepat telah memunculkan beragam kompleksitas dan tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga (Suparman, 2020). Implikasi dari pertumbuhan penduduk yang dinamis ini terhadap struktur

keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan menjadi penting dalam menyusun kebijakan yang efektif dan terarah (Bappenas, 2019).

Penelitian-penelitian terkini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan keluarga serta penerapan strategi yang adaptif dalam merespons perubahan-perubahan ini (Suparman, 2020). Analisis faktual dan pemikiran ke depan yang terperinci menjadi kunci dalam mengembangkan solusi yang berkelanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

SP2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010–2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000–2010 yang sebesar 1,49 persen.

Pertambahan penduduk Nusa Tenggara Barat yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan yang semakin kompleks. Hal ini terlihat pada pencapaian indikator kualitas penduduk yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun dari tahun ke tahun pencapaian nilai IPM Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan, tetapi peningkatan tersebut terlihat sangat lambat. Pada tahun 2019, IPM Nusa Tenggara Barat mencapai 68,14 meningkat 0,84 dari 67,30 pada tahun 2018. Nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menempati posisi 29 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Untuk mengatasi dampak-dampak ini, diperlukan kebijakan yang terarah dan strategi yang inklusif. Langkah-langkah seperti penyediaan akses terhadap layanan dasar, penguatan infrastruktur, pendidikan keluarga, pengaturan kebijakan kependudukan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak

Dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk tersebut maka perlu dilakukan kajian dampaknya terhadap pembangunan keluarga sebagai bagian pembangunan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturanpresiden Republik Indonesia Nomor 153 TAHUN 2014.

METODE

Metode yang digunakan berupa Studi Kasus dan Analisis Statistik Dimana Studi Kasus ini Memilih daerah Nusa Tenggara Barat sebagai studi kasus untuk menganalisis pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga. Hal ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak pertumbuhan penduduk secara langsung pada keluarga di tingkat lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survei dan wawancara. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari integrasi data dimana mengintegrasikan temuan dari analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara pertumbuhan populasi dan pembangunan keluarga. Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang dapat mengarah pada rekomendasi kebijakan atau tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan pembangunan keluarga di tengah pertumbuhan penduduk yang cepat. Metode ini dapat memberikan pendekatan holistik untuk memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga, menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan pendekatan analitis yang berbeda untuk memberikan pandangan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program dan kebijakan telah ditetapkan oleh pemangku kualitas penduduk dalam jangka pendek menengah dan panjang didasarkan kepada proyeksi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan. Namun berdasarkan SP 2020, terdapat kenaikan

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010 dan tahun 2020 dan menggunakan metode Proyeksi Aritmatika, maka diperoleh proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2045 sbb:

Tabel 1. Proyeksi Penduduk 2020 -2045 Berdasarkan Data Sensus 2010-2020

Wilayah	2010	2020	2025	2030	2035	2040	2045
P. Lombok	3,168,692	3,758,645	4,108,541	4,458,437	4,808,332	5,158,228	5,508,124
Lobar	599,986	721,404	794,399	867,394	940,389	1,013,384	1,086,379
Loteng	860,209	1,034,758	1,139,742	1,244,725	1,349,709	1,454,693	1,559,676
Lotim	1,105,582	1,325,235	1,456,881	1,588,528	1,720,174	1,851,820	1,983,467
Mataram	402,843	429,863	444,280	458,696	473,113	487,529	501,945
KLU	200,072	247,384	276,635	305,885	335,135	364,385	393,636
P. Sumbawa	1,331,520	1,561,447	1,696,262	1,831,078	1,965,893	2,100,709	2,235,524
SBW	415,789	509,665	567,200	624,736	682,271	739,807	797,342
Dompu	218,973	236,744	246,351	255,957	265,564	275,171	284,777
Bima	439,228	513,921	557,618	601,316	645,013	688,710	732,408
Kobi	142,579	155,347	162,302	169,258	176,213	183,169	190,124
KSB	114,951	145,771	165,312	184,853	204,394	223,936	243,477
NTB	4,500,212	5,320,092	5,804,718	6,289,343	6,773,969	7,258,595	7,743,221

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.

Tabel 2. Proyeksi Jumlah Rumah Tangga Sasaran Pembangunan Keluarga di NTB

Tahun	Penduduk	Rumah tangga
2010	4,516,062	1,256,988
2020	5,070,385	1,407,554
2025	5,804,718	1,613,538
2030	6,289,343	1,748,249
2035	6,773,969	1,882,961
2040	7,258,595	2,017,672
2045	7,743,221	2,152,384

Berdasarkan Tabel 2 proyeksi jumlah rumah tangga pada tahun 2045 semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula jumlah rumah tangga.

Tabel 3. Proyeksi Penduduk Sasaran Pembangunan Keluarga di NTB

Umur	2025	2030	2035	2040	2045
Balita	628,832	631,832	627,207	614,951	595,067
Anak	775,328	825,464	873,353	918,989	962,378
Remaja	604,004	629,998	652,226	670,689	685,385
Lansia	334,466	387,787	445,018	506,166	571,226

Berdasarkan Tabel 3 proyeksi 2045 jumlah anak lebih banyak, disusul dengan remaja, balita dan lansia.

Tabel 4. Proyeksi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Standar Pelayanan Minimal di NTB

No	Sapras	2025	2030	2035	2040	2045	Ket
1	BKB	628,832	631,832	627,207	614,951	595,067	orang
2	BKR	604,004	629,998	652,226	670,689	685,385	orang
3	BKL	334,466	387,787	445,018	506,166	571,226	orang
4	BPJS	1,613,538	1,748,249	1,882,961	2,017,672	2,152,384	orang
5	Listrik	1,613,538	1,748,249	1,882,961	2,017,672	2,152,384	RT
6	Air Bersih	1,613,538	1,748,249	1,882,961	2,017,672	2,152,384	RT
7	Informasi	1,613,538	1,748,249	1,882,961	2,017,672	2,152,384	RT

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh korelasi antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan keluarga hal ini bermakna bahwa meningkatnya jumlah penduduk di NTB membawa perkembangan bagi pembangunan keluarga, karena dengan meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula peranan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan proses produksi sehingga menambah kapasitas produksi dan menumbuhkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) untuk menciptakan generasi emas pada tahun 2045. SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015 (Panuluh & Fitri, 2016). MDG memiliki delapan tujuan pembangunan millennium, yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Lisbet, 2013; Ramadhani, 2020).

Meningkatnya kapasitas produksi menunjukkan tingkat produktivitas dari penduduk yang terlibat dalam kegiatan produksi tersebut, sehingga harapan berikutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Rochaida, 2016). Meskipun demikian perlu di fahami bahwa untuk menumbuhkan pembangunan keluarga bukan hanya dilihat dari perspektif kependudukan sebagai bagian dari faktor produksi, namun juga diperlukan faktor produksi lainnya seperti investasi, teknologi dan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki dalam wilayah tersebut. Selain itu menurut Yanti dan Merinaldi (2021) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menguatkan teori bahwa tenaga kerja sangat bermanfaat untuk menumbuhkan perekonomian suatu negara, namun sesuai perkembangan terkini bahwa seringkali peranan sumberdaya lain yang jauh lebih besar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis menurut Salim (1976) untuk mengejar suatu tingkat pertumbuhan yang layak, selaras dengan kecepatan pertumbuhan penduduk, diperlukan sumber dana dari luar. Ulasan ini menegaskan kembali bahwa peranan modal juga dominan untuk menumbuhkan perekonomian, yang dalam penelitian ini belum dimasukkan sebagai variabel penentunya. Meskipun demikian orientasi pembangunan sekarang bukan sekedar ada pertumbuhan ekonomi semata namun lebih menekankan pada kemampuan distribusinya agar semua masyarakat dapat menikmati pembangunan tersebut. Disini diperlukan ketegasan pemerintah untuk lebih menekankan bahwa pembangunan kualitas sumberdaya manusia merupakan suatu yang krusial, karena dengan meningkatnya kualitas penduduk dapat mendorong terjadinya kenaikan produktivitas dan menghasilkan output yang tinggi pula. Menurut Teori Human Investment, investasi dibidang sumberdaya manusia dapat dilakukan pada perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan maupun melalui mobilitas penduduknya.

Menurut Soleha (2016) tujuan umum dari adanya program Keluarga Berencana adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ruang lingkup KB secara umum adalah kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur serta penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk pengaturan laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan jumlah kelahiran di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan kependudukan nasional, yang dalam hal ini pelaksanaan program KB di daerah pada era otonomi perlu ditentukan sasaran kinerja program untuk mewujudkan keserasian kependudukan di berbagai bidang pembangunan. Dengan terkendalinya jumlah penduduk, maka akan tercipta generasi yang berkualitas sehingga dapat meneruskan pembanguan Indonesia yang berkualitas. Implementasi program KB di Kecamatan Kranggan, Temanggung terdapat beberapa program pokok yaitu pelayanan alat kontrasepsi, bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), dan upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (Prabowo & Anggoro, 2020).

KESIMPULAN

Pembangunan Keluarga dari sisi kuantitas dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk menuntut pemenuhan standar pelayanan minimal yang terkait dengan sarana prasarana serta wadah juga jumlahnya akan meningkat. Pembangunan Keluarga dari sisi kualitas, menuntut pengawasan yang semakin meningkat dari semua pihak baik dari aparat, lingkungan maupun keluarga untuk mengatasi berbagai persoalan internal maupun eksternal yang terkait degradasi moral, teknologi informasi digital yang begitu masiv serta dampak negatif globalisasi..

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Profil Keluarga Indonesia: Perspektif Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Kusumastuti, D., & Mahadeva, L. (2018). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Demografi Indonesia*, 5(2), 89-102.
- Lisbet. (2013). Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional. *Politica*, 4(1), 33-48. <https://doi.org/10.1080/13629395.2014.1001631>
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia (Issue September).
- PRABOWO, W., & ANGGORO, O. B. (2020). Implementasi Program Pembangunan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kualitas Keluarga Di Kecamatan Kranggan, Temanggung. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(04), 72-77.
- Ramadhani, R. W. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117-129.
- Rochaida, E. (2016, March). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. In *Forum Ekonomi* (Vol. 18, No. 1).
- Soleha, S. (2016). Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara. *Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 39-52.
- Suparman, D., et al. (2020). "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Kesejahteraan Keluarga di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17(1), 45-58.
- Yanti, N., & Meirinaldi, M. (2021). Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi*, 23(2), 75-102.